



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENGUMUMAN**

NOMOR : 001/PANSEL.JPTM/10/2022

**TENTANG**

**SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA  
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN 2022**

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022 dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka untuk jabatan sebagai berikut:

**1) NAMA JABATAN YANG AKAN DIISI**

Nama Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yang akan diisi mengacu pada Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor 3 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>ESELON</b>	<b>UNIT KERJA</b>
1	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	I.a	Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan
2	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	I.a	Kedeputian Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
3	Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan	I.b	Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan

\*) Tugas Fungsi dan Standar Kompetensi Teknis Jabatan disampaikan dalam Lampiran Pengumuman.

## 2) TAHAPAN SELEKSI

### 1. Seleksi Administrasi

- a. Panitia melakukan verifikasi kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
- b. Panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya (sistem gugur).

### 2. Seleksi Kompetensi Manajerial

- a. Peserta akan mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh pihak luar yang ditunjuk oleh Panitia.
- b. Cakupan *assessment* meliputi: Tes Tertulis, *Leaderless Group Discussion* (LGD), dan Wawancara.
  - Bagi peserta yang pernah mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas (dalam waktu 2 tahun terakhir) dapat memilih tidak mengikuti tes.
  - Bagi peserta yang pernah mengikuti *assessment* yang diselenggarakan oleh BKN (dalam waktu 2 tahun terakhir) perlu mengikuti tes untuk melengkapi hasil tes BKN dimaksud.
- c. Panitia Seleksi menetapkan maksimum 5 (lima) calon peserta terbaik yang memenuhi persyaratan dengan batas 5 (lima) kali jumlah formasi setiap jabatan (1:5) untuk mengikuti tahap seleksi berikutnya (sistem gugur).

### 3. Seleksi Kompetensi Teknis

- a. Peserta akan diuji kemampuan dan kompetensi teknisnya melalui tes berupa: penulisan dan presentasi makalah, wawancara mendalam, dan penelusuran rekam jejak.
- b. Panitia Seleksi akan mengumumkan 3 (tiga) calon terbaik masing-masing untuk JPT Madya berdasarkan nilai akumulasi tes seleksi kompetensi manajerial dan seleksi kompetensi teknis serta menyampaikan hasil seleksi kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

## 3) PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia;
2. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
3. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 2 (dua) tahun terakhir;
6. Tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah;
7. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp.10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Calon Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2022;
8. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;

9. Menyusun *Statement of Purpose* yang diunggah ke dalam website pada saat pendaftaran, meliputi pemahaman bisnis proses, visi dan misi pribadi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pada jabatan yang dilamar;
10. **Pelamar dapat memilih maksimal 2 (dua) jabatan. Panitia Seleksi berhak menetapkan pilihan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya bagi peserta yang masuk kedalam 3 (tiga) Terbaik.**

#### 4) PERSYARATAN KHUSUS

1. Kualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1), diutamakan Pasca Sarjana atau Magister (S2);
2. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada **31 Desember 2022**;
3. Mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan;
4. Memiliki pengalaman/pengetahuan terkait tugas dan fungsi jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
5. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) atau jabatan fungsional jenjang ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
6. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Muda (IV/c);

#### 5) KETENTUAN PENDAFTARAN

1. Pendaftaran dimulai tanggal **17 s.d 31 Oktober 2022** secara online pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>;
2. Peserta melakukan pendaftaran dan pengisian data hanya secara *online* dan mengunggah (*upload*) semua dokumen yang diminta sesuai dengan langkah dan tata cara yang telah ditetapkan;
3. Seluruh berkas dalam bentuk softcopy (scan) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam bentuk jpeg/jpg):
  - a. Surat lamaran yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN I** dapat diunduh pada website);
  - b. Daftar riwayat hidup yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN II** dapat diunduh pada website);
  - c. Pakta Integritas yang ditandatangani dan bermaterai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN III** dapat diunduh pada website);
  - d. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan, yang dibubuhi materai Rp.10.000,- (**LAMPIRAN IV** dapat diunduh pada website);
  - e. Surat Pernyataan dari pejabat yang berwenang, bahwa tidak sedang dalam proses penyelesaian pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/berat yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN V** dapat diunduh pada website);

- f. Surat pernyataan tidak sedang memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik/organisasi kemasyarakatan yang dilarang pemerintah, yang dibubuhi materai Rp. 10.000,- (**LAMPIRAN VI** dapat diunduh pada website);
  - g. *Statement of purpose* (**LAMPIRAN VII** dapat diunduh pada website);
  - h. SK Pangkat terakhir;
  - i. SK Pengangkatan dalam jabatan dari awal menjabat hingga yang terbaru;
  - j. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan nilai minimal baik (2 tahun terakhir);
  - k. Tanda Terima Penyerahan LHKPN/LHKASN;
  - l. Ijazah terakhir sesuai dengan persyaratan;
  - m. Tanda bukti penyerahan SPT Tahunan (1 tahun terakhir);
  - n. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Surat Keterangan Sehat Rohani dari Dokter Unit Kesehatan/Puskesmas/RS Pemerintah Setempat (dalam 1 file);
  - o. KTP;
  - p. NPWP;
  - q. Pas foto terbaru (uk. 4x6) berlatar belakang merah;
4. Jenis format file yang diunggah dengan besar maksimal setiap file sebesar 3 MB;
  5. Peserta yang telah mengunggah dokumen yang dipersyaratkan, selanjutnya dapat memilih maksimal 2 (dua) formasi JPT Madya yang diminati;
  6. Apabila mengalami kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Sekretariat Pansel Kementerian PPN/Bappenas di nomor telepon (021) 3905646/0817729484 (WA) dan email: [panseljpt@bappenas.go.id](mailto:panseljpt@bappenas.go.id).

## 6) JADWAL SELEKSI

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU
1	Pengumuman Lowongan	17 Oktober 2022
2	Penerimaan berkas lamaran	17 s.d 31 Oktober 2022
3	Pengumuman Seleksi Administrasi	3 November 2022
4	Seleksi Kompetensi Manajerial ( <i>Assessment Center</i> )	7 – 9 November 2022
5	Pengumuman Hasil Seleksi Manajerial	16 November 2022
6	Seleksi Kompetensi Bidang : Penulisan Makalah	18 November 2022
7	Seleksi Kompetensi Bidang : Presentasi Makalah dan Wawancara	29 - 30 November 2022
8	Pengumuman 3 Terbaik	Desember 2022

Catatan: Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai perkembangan dan setiap perubahan jadwal diinformasikan melalui laman <https://rekutmen.bappenas.go.id/jpt>.

## 7) KETENTUAN LAIN

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah dokumen/berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transport, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi selama proses seleksi ditanggung oleh masing-masing peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa kandidat memberikan sesuatu dalam bentuk apapun dan sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam seleksi terbuka, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan kandidat tersebut;
6. Apabila dikemudian hari diketahui kandidat memberikan data/ keterangan yang tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi;
7. Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/jpt>;
8. Kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab masing-masing peserta;
9. **Mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi.** Masukan tersebut disertai dengan identitas yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dapat dikirim melalui email [panseljpt@bappenas.go.id](mailto:panseljpt@bappenas.go.id).

Jakarta, 17 Oktober 2022

Ketua Panitia Seleksi Terbuka JPT Madya  
Kementerian PPN/Bappenas,



Taufik Hanafi

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'T' followed by a series of loops and a final flourish.

## LAMPIRAN A. TUGAS DAN FUNGSI JABATAN YANG AKAN DIISI

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
1	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	<p><b>Tugas:</b> Menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;</li><li>2) Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;</li><li>3) Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;</li><li>4) Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;</li></ol>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>5) Pengekoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;</p> <p>6) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan;</p> <p>7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang pembangunan manusia, masyarakat, dan kebudayaan; dan</p> <p>8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.</p>
2	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	<p><b>Tugas:</b> Menyelenggarakan pengoordinasian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan.</p> <p><b>Fungsi:</b></p> <p>1) Pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta pengoordinasian kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan nasional;</p> <p>2) Pengekoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan</p>

NO	NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
		<p>nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;</p> <p>3) Penyusunan rencana pembangunan nasional secara holistik integratif di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan dalam penetapan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga/Daerah;</p> <p>4) Pengoordinasian dan pengendalian rencana pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara Rencana Kerja Pemerintah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;</p> <p>5) Pengoordinasian pelancaran dan percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;</p> <p>6) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan;</p> <p>7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan nasional di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan; dan</p> <p>8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas.</p>
3	<p>Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan</p>	<p><b>Tugas:</b> Memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas terkait dengan bidang hubungan kelembagaan.</p>



**LAMPIRAN B. STANDAR KOMPETENSI TEKNIS JABATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>STANDAR KOMPETENSI TEKNIS</b>	<b>LEVEL</b>
1	Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	5
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	5
		Pemantauan	5
		Evaluasi	5
2	Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	5
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi bidang Kedeputian	5
		Pemantauan	5
		Evaluasi	5
3	Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan	Formulasi Kebijakan sesuai tupoksi	5
		Perencanaan Pembangunan sesuai tupoksi	5
		Pemantauan	5
		Evaluasi	5